

# Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Arham<sup>1</sup>, Ramli<sup>2</sup>, Jeffriansyah Dwi Saputra A<sup>3</sup>.

[arhamnan02@gmail.com](mailto:arhamnan02@gmail.com), [irvanramli@gmail.com](mailto:irvanramli@gmail.com)<sup>2</sup>, [jeffriamori@gmail.com](mailto:jeffriamori@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Mamuju. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan yaitu analisis dari perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dan perhitungan indeks williamson. Berdasarkan perbedaan dari PDRB setiap wilayah maka daerah kabupaten pasangkayu menjadi daerah dengan kemampuan ekonomi yang besar, disusul daerah kabupaten mamuju, selanjutnya kabupaten majene, kabupaten polewali mandar, kabupaten mamuju tengah dan terendan terletak pada kabupaten mamasasa. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil olah data yang diperoleh maka tingkat ketimpangan pembangunan tahun 2023 nilai indeksnya berada diatas 0,35 dan dibawah dari 0,5 maka dapat diketahui bahwa angka tersebut berada di kategori rendah.

Kata Kunci : ketimpangan, indeks williamson

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## Pendahuluan

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa setiap wilayah, dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar. Kewenangan tersebut akan menyebabkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi berbeda karena perbedaan geografis suatu wilayah, kebijakan dan anggaran Pembangunan yang tersedia. Ada daerah yang mampu memacu kegiatan ekonominya sehingga siklus ekonominya stagnan atau bahkan berkontraksi menjadi minus pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendapatan perkapita setiap wilayah tentunya berbeda-beda pula, bergantung pada nilai pendapatan (PDRB) dan juga jumlah penduduk disuatu wilayah. Perbedaan wilayah, kebijakan dan anggaran dalam Pembangunan daerah akan mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah (Noviar, 2021).

Pada setiap wilayah mempunyai ketersediaan sumber daya alam yang beragam dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan menggunakan sumber daya alam yang terdapat di setiap wilayahnya. Namun jika tidak terpenuhi, akan memenuhinya dari wilayah lain yang terdapat sumber daya alam yang diperlukannya. Oleh sebab itu, antar wilayah terjalin hubungan dalam perekonomian dapat digambarkan sebagai suatu proses penawaran dan permintaan.

Wilayah yang memiliki sumber daya alam yang ada, mampu membuat wilayahnya memiliki ciri khusus dan berbeda dengan wilayah lain. Jika wilayah tersebut dapat menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik, maka wilayah tersebut akan mendapatkan nilai tambah.

Sehingga keuntungan yang diperoleh dapat menjadikan wilayahnya menjadi wilayah yang maju dan unggul. Hubungan timbal balik tersebut dapat menjadikan hubungan yang saling mengisi satu sama lain. Dengan kondisi demikian, kedua wilayah yang saling melakukan interaksi akan memperoleh keuntungan ataupun manfaat dari hubungan tersebut. Pemerataan hasil pembangunan mutlak diperlukan agar ketimpangan pembangunan dapat ditekan sehingga tidak menimbulkan gejolak masyarakat dan mememicu konflik nasional (Didu & Fauzi, 2016).

Pemerintah berperan cukup besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan karena pemerintah merupakan penggerak utama pembangunan. Anggaran pembiayaan pembangunan menjadi pedoman dalam membiayai tugas negara berasal dari berbagai sumber pendapatan baik dalam maupun luar negeri dan dapat dipergunakan sebagai alat kebijaksanaan ekonomi. Oleh sebab itu, anggaran negara harus sesuai prinsip dengan kondisi dan keadaan ekonomi. Adapun anggaran negara dapat digunakan sebagai alat kebijaksanaan fisik dalam mempengaruhi pemerintah baik secara jumlah maupun proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan peningkatan aktivitas pemerintah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Pada umumnya daerah-daerah yang memiliki basis perekonomian di sektor pertanian identik dengan keteringgalan dalam pembangunan. Akan tetapi dapat menjadi keunikan dan kekuatan tersendiri dalam merencanakan strategi pembangunan wilayah. Keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian (hulu) dan sektor industry (hilir) dalam struktur perekonomian wilayah merupakan pondasi yang kuat dalam perkembangan perekonomian.

Perbedaan tersebut bisa menjadi salah satu indikasi terjadinya disparitas pembangunan wilayah di Sulawesi Barat, perbedaan lainnya juga dapat dilihat berdasarkan kasat mata dimana wilayah kota perkembangannya jauh lebih baik dari wilayah kabupaten. Perbedaan karakteristik limpahan sumberdaya alam merupakan salah satu penyebab disparitas antar wilayah. Dengan mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan terciptanya ketimpangan dalam pembangunan yang terjadi, maka diharapkan dapat segera mengantisipasi dan mensiasati ketimpangan yang terjadi agar sinkronisasi perkembangan wilayah dapat segera tercipta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan, khususnya perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada setiap Kabupaten di Provinsi Sulawesi. Oleh sebab itu penulis mengangkat penelitian dengan judul "Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023"

## **KAJIAN TEORI**

### **Pembangunan Ekonomi**

Pembangun ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Fitria, 2016).

Menurut Hasan & Muhammad (2018:7) pembangunan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi sebagai faktor ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama Lembaga sosial, kondisi politik, sikap budaya, nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang sebagai faktor non ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan selanjutnya membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk membentuk lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maulana (2019) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

### **Ketimpangan Pembangunan**

Ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai aspek. Aspek yang mempengaruhi ketimpangan tidak hanya berasal dari aspek manusia semata, melainkan juga dari aspek alam seperti karakteristik geografis dan potensi sumber daya alam. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah di Indonesia menyebabkan ketimpangan ekonomi antar suatu daerah dengan daerah lainnya (Sukwika, 2018).

Ketimpangan/disparitas antar wilayah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (Nursaid, 2020).

### **Produk Domestik Regional Bruot (PDRB)**

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode, menurut Hartono, dkk. (2018). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya. Dalam perkembangan terdapat banyak teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain : teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neoklasik dan teori pertumbuhan kuznet (Sitorus, 2017).

## **METODOLOGI**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat yang berpusat di Kabupaten Mamuju

### **Jenis Penelitian**

1. Data primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pihak yang terkait melalui dokumentasi.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari Jurnal, Perpustakaan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

### **Populasi dan Sampel**

#### **Populasi**

Populasi merupakan wilayah keseluruhan yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari yang

kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data PDRB kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.

### Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah data PDRB dari 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023.

### Metode Analisis Data

Untuk mengukur ketimpangan pembangunan pada penelitian ini menggunakan Indeks Williamson berfungsi untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut Aprilianti & Harken (2021) Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan perbedaan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan besarnya deviasi PDRB per kapita kabupaten dari rata-rata PDRB per kapita provinsi.

Untuk dapat memberikan gambaran lebih jelas maka berikut ini penjelasannya :

$$I_w = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 (f_i/n)}{Y}}$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

Y<sub>i</sub> = PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat atas dasar harga konstan

Y = PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Barat atas dasar harga konstan

F<sub>i</sub> = Jumlah penduduk kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

n = Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat

### Tabel 1

#### Indikator Ketimpangan Pembangunan

IW < 0,35	Ketimpangan pembangunan taraf rendah
0,35 < IW < 0,5	Ketimpangan pembangunan taraf sedang
IW > 0,5	Ketimpangan pembangunan taraf tinggi

Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau pembangunan yang merata dan bila semakin jauh dari titik nol (mendekati satu) menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar.

## HASIL PENELITIAN

### Produk Domesti Regional Bruto

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap periode sebelumnya.

### Tabel 2

#### Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Ribuan Rupiah) tahun 2023

Kabupaten	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Ribuan Rupiah) tahun 2023
Kabupaten Majene	21.384
Kabupaten Polewali Mandar	20.588
Kabupaten Mamasa	13.847
Kabupaten Mamuju	30.717
Kabupaten Pasangkayu	39.566
Kabupaten Mamuju Tengah	16.829

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan klasifikasi pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai PDRB ADHK terendah berada pada kabupaten mamasa dengan angka 13.847. Sedangkan tingkat nilai diatas dari kabupaten mamasa berada pada kabupaten mamuju Tengah dengan angka 16.829. Pada urutan ketiga dari terendah berada pada kabupaten polewali mandar dengan angka 20.588 dan kabupaten majene dengan angka 21.384 tidak terlalu jauh. Berbeda dengan kabupaten mamuju dengan angka 30.717 dengan urutan kedua dari yang tertinggi pada PDRB ADHK Tahun 2023. Sedangkan urutan teratas berada pada kabupaten Pasangkayu dengan angka 39.566.

### Indeks Williamson

Tabel 3

#### Hasil Olah Data Indeks Williamson

Tahun	Tingkat Ketimpangan Pembangunan
2023	0,47

Sumber : Hasil perhitungan indeks williamson di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023

Berdasarkan hasil olah data dengan perhitungan indeks Williamson seperti pada tabel.. diatas maka dapat dijelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023 ketimpangan pembangunan nilai indeksnya berada pada angka 0,47 maka dapat diketahui bahwa indikatornya berada pada kategori sedang.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Berdasarkan angka PDRB tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Barat dengan kondisi kemampuan ekonomi yang besar terletak pada kabupaten pasangkayu sedangkan tingkat ekonomi terendah terletak pada kabupaten mamasa.
2. Tingkat ketimpangan pembangunan berdasarkan perhitungan indeks williamson di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 dapat terletak pada kategori ringan.

### Saran

Berdasarkan analisa dan pembahasan dari kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan adalah diharapkan kepada pihak terkait baik pemerintahan hingga pelaku dari pengusaha, petani dan sebagainya yang menjadi pendorong ekonomi suatu daerah dapat meningkatkan atau memanfaatkan kemampuan berdasarkan potensi dari wilayahnya masing-masing.

### Referensi :

- Aprilianti, V. A., & Harken, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(2), 1142–1160. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v5i2.111>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2020). *Sulawesi Barat dalam Angka*.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hartono, R., Busari, A., & Awaluddin, M. (2018). Pengaruh produk domestik regional bruto (pdrb) dan upah minimum kota (umk) terhadap penyerapan tenaga kerja. *Inovasi*, 14(1), 36–43.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). 1 | *Pembangunan Ekonomi*. [http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku\\_pembangunan\\_ekonomi\\_contoh\\_fix.pdf](http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku_pembangunan_ekonomi_contoh_fix.pdf)
- Jufrizen, J., & Rahmadhani, K. N. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja

- Pegawai Dengan Lingkungan Kerja Sebagai Variabel Moderasi. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 3(1), 66–79. <https://doi.org/10.26533/jmd.v3i1.561>
- Maulana, A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 19(1), 1–6.
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>
- Noviar. (2021). Inequality Analysis And Classification Of Economic Development Regencies/Cities In Banten Province 2016-2020. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 24–33.
- Nursaid, A. (2020). Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi di Pulau Sulawesi Periode 2010 - 2018 *Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1441 H / 2020 M*.
- Rosnawati, W. O., Bahtiar, B., & Ahmad, H. (2018). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Pemukiman Atas Laut Di Kecamatan Kota Ternate. *Techno: Jurnal Penelitian*, 6(02), 48. <https://doi.org/10.33387/tk.v6i02.569>
- Sitorus, I. (2017). Pemikiran Adam Smith Tentang Pasar Bebas Perspektif Ekonomi Islam. *E-Repository Perpustakaan IAIN Bengkulu*, 32–34. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/418/>
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96–102. <https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1540>
- Yusmar Yusuf, H., Jurusan Sosiologi, Mp., Riau Kampus Bina Widya Jln Soebrantas Jaalan Km, U. H., & Baru, S. (2107). Perilaku Seksual Pranikah Pelajar di Kota Pekanbaru (Studi Komparatif Antara Siswa Sekolah Menengah Umum dan Siswa Sekolah Menengah Berbasis Agama Islam) OLEH: MILA PRATIWI DWI PUTRI. *Jom FISIP*, 4(1).